



P-ISSN: 2716-2656, E-ISSN: 2985-9638

# JOURNAL MARINE INSIDE

VOLUME 6, ISSUE. 2, DECEMBER 2024

Web: <https://ejournal.poltekpel-banten.ac.id/index.php/ejmi/>

## Evaluasi implementasi ISPS Code di Pelabuhan Banten: Studi kasus kunjungan USCG tahun 2019

Hendi Prasetyo, Ahmad Shulhany\*

Politeknik Pelayaran Banten

E-mail: [\\*ahmad.shulhany@gmail.com](mailto:*ahmad.shulhany@gmail.com)

### ABSTRAK

*Keselamatan dan keamanan pelabuhan adalah elemen esensial dalam menjaga kelancaran operasional dan reputasi perdagangan maritim internasional. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code di Pelabuhan Banten, Indonesia, dengan fokus pada persiapan teknis dan administratif yang dilakukan oleh pihak pelabuhan serta tanggapan terhadap evaluasi yang dilakukan oleh United States Coast Guard (USCG) pada Juli 2019. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah kekuatan, seperti kepatuhan terhadap protokol dasar ISPS Code, beberapa kelemahan teridentifikasi, termasuk dalam manajemen kontrol akses dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Artikel ini memberikan kontribusi dengan mengajukan rekomendasi perbaikan yang praktis, untuk mendukung pelabuhan dalam memenuhi standar keamanan internasional secara lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis bagi pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia dalam meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap ISPS Code.*

**Kata Kunci:** *ISPS Code, USCG, Pelabuhan Banten, keselamatan maritim, keamanan pelabuhan.*

### ABSTRACT

*Port safety and security are essential in maintaining international maritime trade's smooth operation and reputation. This study aims to evaluate the implementation of the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code at the Port of Banten, Indonesia, with a focus on the technical and administrative preparations made by the port and the response to the evaluation conducted by the United States Coast Guard (USCG) in July 2019. The main findings of this study indicate that despite several strengths, such as compliance with the basic protocols of the ISPS Code, several areas for improvement were identified, including access control management and coordination between stakeholders. This article contributes by proposing practical recommendations for improvements to effectively support the port in meeting international security standards. The results of this study are expected to provide strategic insights for other ports in Indonesia to improve their compliance with the ISPS Code.*

**Keywords:** *ISPS Code, USCG, Banten Port, maritime safety, port security.*



**Journal Marine Inside** is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

---

Disubmit pada 07/08/2024	Direview pada 15/08/2024	Direvisi pada 08/09/2024
Diterima pada 11/09/2024	Diterbitkan pada 10/12/2024	

---

## PENDAHULUAN

Keselamatan dan keamanan pelabuhan adalah elemen fundamental untuk memastikan kelancaran operasional dan reputasi perdagangan maritim internasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 300 pelabuhan komersial yang tersebar di seluruh nusantara, dan bertanggung jawab untuk memastikan pelabuhan-pelabuhan tersebut memenuhi standar keselamatan global. Salah satu standar internasional yang paling relevan adalah International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code [1], yang menjadi landasan bagi pengelolaan keamanan maritim. Standar ini berperan penting dalam mengurangi risiko keamanan yang dapat mengganggu rantai pasok global, termasuk ancaman terorisme, penyelundupan, dan perdagangan ilegal.

ISPS Code, yang diadopsi sebagai bagian dari International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 [2], bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko keamanan melalui serangkaian protokol yang mencakup pengawasan ketat, kontrol akses, dan respons terhadap ancaman. Sebagai anggota International Maritime Organization (IMO), Indonesia meratifikasi SOLAS 1974 melalui Keppres No. 65 Tahun 1980 [3], dan dengan demikian diwajibkan untuk menerapkan ISPS Code di semua pelabuhan internasionalnya. Penerapan ISPS Code di Indonesia tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap keamanan maritim global, tetapi juga menjadi indikator kesiapannya dalam mendukung perdagangan internasional yang aman.

Pelabuhan Banten, sebagai salah satu pelabuhan strategis di Indonesia, memainkan peran vital dalam jaringan transportasi maritim internasional [4]. Namun, implementasi ISPS Code di pelabuhan ini menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penerapan ISPS Code di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melibatkan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, keterbatasan teknologi, dan kendala koordinasi antar lembaga [5]. Dalam konteks Pelabuhan Banten, evaluasi tahun 2019 oleh tim United States Coast Guard (USCG) mengungkapkan berbagai area yang memerlukan perbaikan, seperti kontrol akses dan pengelolaan risiko keamanan [6]. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasi di lapangan, yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan ISPS Code.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan ISPS Code di Pelabuhan Banten dengan menelaah aspek teknis dan administratif, termasuk kesiapan menghadapi audit internasional dan respons terhadap temuan evaluasi. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem keamanan pelabuhan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas implementasi. Dengan menyajikan temuan empiris yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keamanan pelabuhan di Indonesia secara umum.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif untuk

mengevaluasi implementasi International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code di Pelabuhan Banten, dengan fokus khusus pada evaluasi yang dilakukan oleh United States Coast Guard (USCG) pada Juli 2019. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis mendalam dan komprehensif terhadap konteks, tantangan, dan implementasi kebijakan ISPS Code di pelabuhan ini. Studi kasus deskriptif kualitatif sangat sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi dalam konteks tertentu [6]. Dalam hal ini, pendekatan ini memberikan gambaran rinci tentang persiapan teknis, administratif, dan operasional Pelabuhan Banten untuk memenuhi standar internasional ISPS Code.

Penelitian ini menggunakan data dari dua jenis sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan administrator pelabuhan, petugas keamanan, dan pejabat yang terlibat langsung dalam penerapan ISPS Code. Wawancara ini dirancang untuk menggali tantangan, langkah-langkah persiapan, dan persepsi responden terhadap hasil evaluasi USCG. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk memahami kondisi fisik pelabuhan, prosedur keamanan yang diterapkan, dan mekanisme operasional dalam penerapan ISPS Code. Data sekunder meliputi dokumen kebijakan, laporan hasil evaluasi USCG, catatan inspeksi, dan referensi literatur terkait ISPS Code. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi tambahan yang relevan untuk menganalisis penerapan ISPS Code di Pelabuhan Banten dalam konteks kebijakan nasional dan standar internasional.

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan untuk menilai langsung implementasi ISPS Code, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan narasumber kunci, serta analisis dokumen resmi seperti kebijakan pelabuhan, laporan inspeksi, dan dokumen operasional [9]. Kedua, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola kunci terkait implementasi ISPS Code. Analisis ini melibatkan pengkodean data, pengelompokan tema, dan interpretasi dalam konteks teori keamanan maritim serta standar kebijakan pelabuhan internasional [10]. Ketiga, validasi data dilakukan melalui triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Konsistensi data diuji dengan melibatkan diskusi dengan pakar keamanan maritim untuk memastikan interpretasi yang akurat dan relevan [11-12].

Evaluasi penerapan ISPS Code di Pelabuhan Banten didasarkan pada kriteria yang mencakup keamanan perimeter pelabuhan, prosedur kontrol akses, kesiapan personel keamanan, serta efektivitas komunikasi dan koordinasi antar lembaga. Kriteria ini digunakan untuk membandingkan temuan lapangan dengan standar ISPS Code dan pedoman yang ditetapkan oleh USCG. Pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif dipilih karena memberikan kemampuan eksplorasi mendalam terhadap implementasi ISPS Code, yang melibatkan interaksi kompleks antara kebijakan, sumber daya, dan operasional pelabuhan. Selain itu, pendekatan ini relevan untuk menangkap nuansa spesifik yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, seperti persepsi personel pelabuhan terhadap evaluasi USCG dan respons terhadap tantangan yang dihadapi. Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan rinci tentang penerapan ISPS Code di Pelabuhan Banten tetapi juga menyajikan rekomendasi strategis yang dapat diaplikasikan di pelabuhan lain di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

Pelabuhan Banten, sebagai salah satu pelabuhan internasional utama di Indonesia, telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam menerapkan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*. Evaluasi oleh *United States Coast Guard (USCG)* pada Juli 2019 menunjukkan bahwa pelabuhan ini telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mematuhi standar keamanan internasional. Namun, hasil evaluasi juga mengungkapkan kelemahan di beberapa aspek yang membutuhkan perbaikan segera agar tingkat kepatuhan yang optimal dapat dicapai. Temuan ini dianalisis secara mendalam dengan menghubungkan hasil penelitian dengan teori dan studi terdahulu guna memperkuat argumen.

Salah satu temuan utama dari evaluasi adalah kekurangan dalam infrastruktur keamanan di Pelabuhan Banten. Meskipun pelabuhan ini telah memasang pagar pembatas dan menerapkan kontrol akses yang ketat, ketidakadaan *Closed-Circuit Television (CCTV)* di area strategis, seperti pintu keluar dan pintu masuk utama, menjadi kelemahan signifikan. Dalam sistem keamanan modern, CCTV berfungsi sebagai elemen kunci untuk deteksi dini dan respons cepat terhadap ancaman [7]. Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sarjito [13], menekankan pentingnya teknologi pengawasan dalam meningkatkan efektivitas keamanan pelabuhan. Investasi dalam teknologi ini, termasuk pengadaan CCTV dan perangkat pendukung lainnya, diperlukan untuk memastikan pengawasan yang lebih baik di seluruh area pelabuhan.

Personel keamanan Pelabuhan Banten dinilai memiliki pemahaman yang baik terhadap prosedur ISPS Code. Namun, temuan menunjukkan bahwa perlengkapan operasional mereka, seperti sepatu dan pakaian kerja, sering kali tidak memenuhi standar internasional. Hal ini dapat mengurangi efisiensi dan mobilitas personel, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat. Menurut Sarjito [14], kesiapan personel yang dilengkapi dengan peralatan yang sesuai sangat penting untuk keberhasilan penerapan kebijakan keamanan. Selain pengadaan perlengkapan yang memadai, pelatihan berkelanjutan juga harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi ancaman keamanan yang dinamis.

Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penerapan ISPS Code masih menjadi tantangan signifikan di Pelabuhan Banten. Evaluasi USCG mengungkapkan adanya miskomunikasi antara otoritas pelabuhan, kepolisian, dan instansi lainnya, yang berpotensi menghambat kelancaran operasional. Sinergi antar lembaga merupakan fondasi utama dalam menjaga keamanan pelabuhan, sebagaimana ditekankan oleh Hawari dan Adiyono [15]. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan protokol komunikasi yang lebih jelas dan terstruktur, serta peningkatan frekuensi pertemuan koordinasi. Pendekatan ini akan membantu memastikan peran dan tanggung jawab yang lebih jelas di antara semua pemangku kepentingan.

Dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah menjadi elemen krusial dalam keberhasilan penerapan ISPS Code. Meskipun Pelabuhan Banten telah menunjukkan upaya yang baik, keterbatasan anggaran sering menjadi kendala dalam pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Menurut Kristiyanti, dkk. [16], kebijakan yang mendukung keamanan pelabuhan, termasuk alokasi dana yang memadai, sangat penting untuk menjaga daya saing pelabuhan di pasar global. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat komitmen ini dengan memastikan keberlanjutan pendanaan dan kebijakan strategis yang mendukung keamanan pelabuhan.

## Diskusi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pelabuhan Banten telah melakukan upaya signifikan untuk mematuhi ISPS Code, ada ruang perbaikan yang substansial di berbagai area. Peningkatan infrastruktur teknologi keamanan, seperti CCTV, menjadi prioritas utama untuk memperkuat pengawasan dan deteksi dini ancaman. Selain itu, perlengkapan operasional yang memadai dan pelatihan berkelanjutan harus diberikan kepada personel keamanan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas. Koordinasi antar lembaga yang lebih baik melalui protokol komunikasi yang jelas juga akan mendukung penerapan ISPS Code secara efektif. Dukungan kebijakan dan pendanaan yang lebih kuat dari pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa Pelabuhan Banten dapat memenuhi standar keamanan internasional secara berkelanjutan.

Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kesiapan personel, koordinasi antar lembaga, dan kebijakan yang mendukung, Pelabuhan Banten memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas penerapan ISPS Code. Langkah-langkah strategis ini akan memperkuat posisinya sebagai pelabuhan internasional utama di Indonesia dan membantu menghadapi tantangan keamanan maritim di masa depan.

## KESIMPULAN

Pelabuhan Banten telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*, namun evaluasi USCG mengungkapkan kelemahan pada infrastruktur, seperti kurangnya CCTV di area strategis, serta perlengkapan personel yang belum memadai. Selain itu, koordinasi antar lembaga masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas operasional. Disarankan pemasangan CCTV, pengadaan perlengkapan standar internasional, pelatihan personel berkelanjutan, serta penguatan sinergi antar lembaga melalui komunikasi yang jelas. Dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah juga diperlukan untuk memastikan implementasi berkelanjutan. Dengan langkah ini, Pelabuhan Banten dapat meningkatkan keamanan dan menjaga reputasinya secara global.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Karim, A., Lesmini, L., Sunarta, D. A., Suparman, A., Yunus, A. I., Khasanah, K., Marlita, D., Saksono, H., Asniar, N., & Andari, T. (2023). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Cendikia Mulia Mandiri.
- [2] Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan sinergitas strategi ekonomi dan keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, vol. 3, no. 1, pp. 1-17.
- [3] Chaerul Alwi, C. A. (2024). Persiapan ruang muat kapal curah guna menunjang keberhasilan dalam proses pemuatan di MV. Ace Win. *Disertasi*. Makassar: Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.
- [4] Firdausy, C. M. (2021). *Memajukan Logistik Indonesia yang Berdaya Saing*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [5] Wahyudi, M. N. B., Priyono, B., & Prawirosastro, C. L. (2024). Dry bulk loading and

- unloading services at JIPE Gresik Port. *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan*, vol. 15, no. 1, no. 82-94.
- [6] Alfaryadi, M. G. (2023). Upaya mencegah terjadinya broken space terhadap pelaksanaan bongkar muat batu bara di PT Maribu Bahtera Kaltim Cabang Sangkulirang. *Disertasi*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta.
- [7] Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (1985). *Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.88/AL.305/Phb-85 tentang Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- [8] Sudjatmiko, F. D.C. (2007). *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- [9] Ahmad, I. M. (2018). Manajemen penanganan muatan clinker di Kapal MV. KT 05. *Disertation*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- [10] Ameliany, N., Ritonga, N., Sufi, S., Iryani, L., Sjafruddin, S., & Failla, F. (2024). Analisis pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Nusantara dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, vol. 7, no. 1, pp. 443–457.
- [11] Gultom, E. (2017). Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 19, no. 3, pp. 419-444.
- [12] Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [13] Sarjito, A. (2023). Peran Teknologi Dalam Pembangunan Kemaritiman Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, vol. 11, no. 4, pp. 219-236.
- [14] Sarjito, I. A. (2023). *Manajemen Logistik Pertahanan*. Sukabumi: Jejak Publisher.
- [15] Hawari, S. M., & Adiyono, S. (2024). *Transformasi Digital pada Manajemen Pelabuhan*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- [16] Kristiyanti, M., Kundori, K., & Hermawati, R. (2023). Membangun sumber daya manusia dan teknologi informasi sebagai dasar kejayaan maritim di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, vol. 23, no. 2, pp. 109-122.